

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

DINAS PERIKANAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024**

diskan@luwutimurkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERIKANAN

Kompleks Tempat Pemasaran Ikan (TPI), Desa Wewangriu, Malili Kec. Malili
Telepon/Fax. (0474) 321 510 Kode Pos 92981
e.mail : dinaskelautanluwutimur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
NOMOR : 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2024, perlu disusun rencana kerja perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024;

b. bahwa Rencana Kerja Perubahan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Dinas Perikanan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Juli 2024

KERAAKABINAS PERIKANAN



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19651231 198603 1 134

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 63 Tahun 2024

Tanggal : 1 Juli 2024

**SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2024 DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

KEPALA DINAS PERIKANAN



DIS. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19651231 198603 1 134

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga “Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perikanan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Renja ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2024 dan memberi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya terutama pada sektor Perikanan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari *stakeholder* dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan perikanan di daerah.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja Perubahan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan perikanan di Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Juni 2024

KEPALA DINAS,



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19651231 198603 1 134

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	15
BAB V PENUTUP	16
Lampiran.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.....	10
Tabel 2.2 Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD.....	2
----------	--	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
- Lampiran 2 Rancangan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Muatan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, wajib dijabarkan oleh setiap OPD dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 sebagai dokumen acuan dalam perencanaan setiap tahunnya.

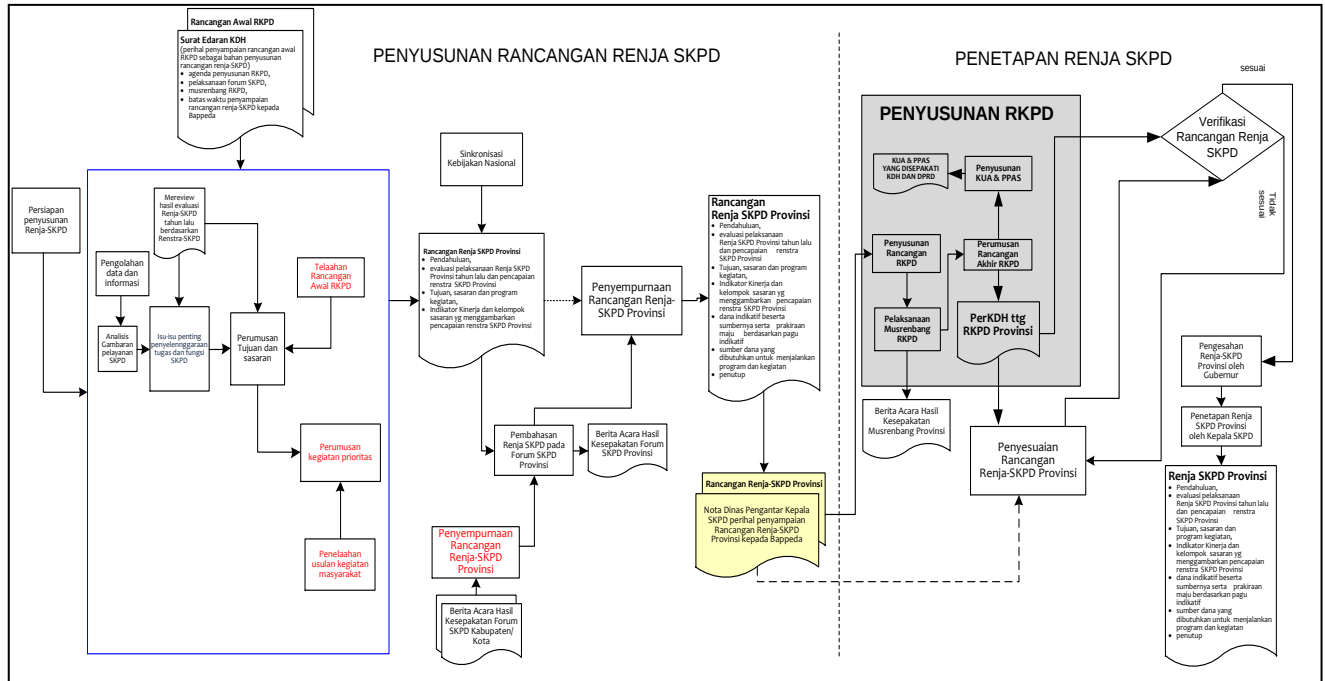
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja harus mengacu pada Renstra OPD dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro sektor Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan pilihan program maupun kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang dan berkesinambungan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Prioritas pembangunan Dinas Perikanan difokuskan pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD tahun 2024. Penyusunan Renja OPD harus mempertimbangan RKP

Nasional, RKPD Propinsi dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Timur.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah:



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur TA. 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 nomor 16);
 22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 nomor 86);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah:

- ☞ Untuk menjabarkan program dan kegiatan RENSTRA OPD ke dalam program/kegiatan Tahunan;
- ☞ Menyiapkan acuan bagi penyusunan RAPBD-P, KUA PPAS-P, RKA P Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024;
- ☞ Menyiapkan Kerangka valuasi Kinerja Program/Kegiatan dalam 1 Tahun; serta
- ☞ Membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya Perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur secara optimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- ☞ Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- ☞ Terbangunnya konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan;
- ☞ Menyediakan satu tolok ukur yang dapat dijadikan indikator dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perikanan;
- ☞ Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; serta
- ☞ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya Perikanan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Dokumen Renja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur TA. 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur menetapkan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021-2026.

Secara umum evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2024, dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja OPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan Tahun Anggaran 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur telah wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2024 dapat dilihat melalui **Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan** yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021-2026 disajikan pada **Lampiran 1. (Terlampir)**

Berdasarkan tabel evaluasi Renja Dinas Perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri atas 9 (Sembilan) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar 51,44 % dengan Predikat Kinerja Rendah sedangkan Realisasi

Anggaran sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp.2.292.279.800,- atau 47,18 % dari pagu anggaran sebesar Rp.4.858.557.700,-. Realisasi Keuangan pada program ini masih rendah karena adanya beberapa sub kegiatan belum mencapai target kinerja seperti pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, serta Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini terdiri atas 3 (Tiga) Kegiatan dan 6 (Enam) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar 37,07 % dengan Predikat Kinerja sangat rendah sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp.3.802.795.708,- atau 38,37 % dari pagu anggaran sebesar Rp.9.911.437.800,-. Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena Pada beberapa Sub Kegiatan ini yang menjadi target kinerja tidak terealisasi karena Lambatnya proses Penetapan PPK dan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan sehingga target kinerja tidak tercapai.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini terdiri atas 2 (Dua) kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar 7,06 % dengan Predikat Kinerja sangat rendah sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp.261.594.500,- atau 4,08 %, dari pagu anggaran sebesar Rp.6.417.026.200,-. Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena Pada beberapa Sub Kegiatan ini yang menjadi target kinerja tidak terealisasi karena Lambatnya proses Penetapan PPK dan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan sehingga target kinerja tidak tercapai.

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini terdiri atas 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan. Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar 50 % dengan Predikat Kinerja sangat rendah sedangkan Realisasi Anggaran

sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp.18.449.000,- atau 23,57 % dari pagu anggaran sebesar Rp.78.266.500,-. Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena kegiatan yang menjadi target kinerja tidak terealisasi yang disebabkan belum optimalnya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan karena terkendala cuaca dan kesiapan petugas patroli.

5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini terdiri atas 3 (Tiga) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu Realisasi Kinerja sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar 9,30 % dengan Predikat Kinerja sangat rendah sedangkan Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp.113.251.400,- atau 7,28 % dari pagu anggaran sebesar Rp.1.555.019.500,-. Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan karena Pada beberapa Sub Kegiatan yang menjadi target kinerja tidak terealisasi karena Lambatnya proses Penetapan PPK dan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan sehingga target kinerja tidak tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Urusan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk peningkatan usaha perikanan dan menumbuhkan sikap kemandirian petani ikan dalam upaya peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang berorientasi pada pola agroindustri yang berbasis Sumber daya lokal dan pasar global. Selain itu, pelaksanaan urusan Perikanan dan implementasi dari Visi Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 yaitu **“Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan

sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur

No	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISIS
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11						
2	Produksi Perikanan (%)	100	100	100	100	100	101,06					
3	Konsumsi Ikan (%)	100	100	100	100	100	100					
4.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	26,66					
5	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	3,11					
6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	1.27	1.28	1.29	1.30	1.31	1.28					
7	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.001					
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	106,01	106,87	107.73	108,59	109,45	103.93					

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pelayanan publik (*public service*) dan tanggung jawab (akuntabilitas), dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan.

Beberapa isu strategis yang melingkupi pelaksanaan pelayanan di sektor Perikanan antara tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 : Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI

Isu Permasalahan dalam pelaksanaan TUPOKSI				
	Lingkungan Hidup	Sosial- Budaya	Ekonomi	Kelembagaan
1	Penurunan stok ikan	Kesenjangan gender/akses perempuan masih rendah untuk ikut berpartisipasi	Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha perikanan	
2	Pemanfaatan tata ruang laut dan pesisir (sinergitas perencanaan yang lemah)	a. Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah b. Teknologi dan infrastruktur untuk akses informasi masih kurang	a. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan (balai benih unggul dan kebun bibit rumput laut) b. Inovasi teknologi usaha perikanan masih kurang	
3	Masih maraknya IUU <i>fishing</i> di wilayah pesisir dan perairan umum	Pemahaman masyarakat tentang penanganan mutu masih rendah	Pengelolaan pelabuhan perikanan belum optimal	
4	Hama dan penyakit udang/ikan/rumput laut	Kualitas SDM dan kelembagaan masih lemah	Sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan masih terbatas	
5	Degradasi dan kerusakan lingkungan	Pemahaman ekosistem berkelanjutan masih sangat rendah	Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil	

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dimiliki dan merupakan kelebihan organisasi secara internal. Kekuatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- a. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
- b. Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan, tugas dan fungsi organisasi serta Peraturan Daerah lainnya yang menunjang kebijakan pengelolaan kegiatan perikanan;
- d. Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- e. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- f. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian;
- g. Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur; dan
- h. Adanya iklim kerja yang kondusif di dalam lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara internal/bersifat ke dalam. Adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- a. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;

- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.
- c. Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja
- d. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang undangan;
- e. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik manajerial, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran;
- f. Kurangnya penguasaan pegawai di bidang teknologi informasi; dan
- g. Masih ditemukannya budaya kerja pegawai/Pegawai ASN yang bekerja menunggu perintah atasan dan tidak memahami tugas pokok dan fungsi.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*);
- b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar Pegawai ASN berdisiplin dan profesional.
- c. Adanya komitmen untuk menegakkan disiplin aparatur pemerintah daerah yang ditunjang dengan adanya penerapan sanksi yang tegas serta makin kritisnya masyarakat dalam menangani masalah hukum kepegawaian terutama dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk menciptakan *good governance*;
- d. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan;
- f. Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang profesional dan berwawasan global;
- g. Tersedianya jaringan internet online di semua Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

4. Tantangan (*Threat*)

- a. Perubahan dan perkembangan teknologi dan permasalahan di masyarakat yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
- b. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat;
- c. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat perikanan. Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- d. Kurangnya tingkat partisipasi stakeholder di dalam pemenuhan persyaratan administrasi untuk pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- e. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis dan fungsional untuk meningkatkan kompetensi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2024 Dinas Perikanan direncanakan melaksanakan 5 Program, 18 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.22.768.327.700,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Lampiran 2 (*terlampir*).

BAB V PENUTUP

Rencana kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Seluruh elemen pelaksana di Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur wajib menerapkan prinsi efefisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya maka pada Tahun Anggaran 2024, Renja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan sebanyak 5 Program yang akan diakselarasikan dengan visi misi Bupati terpilih serta RPJP Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaanya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan

masukannya sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Malili, Juni 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pemuda Utama Muda (IV/c)

Nip. 19651231 198603 1 134

LAMPPIRAN

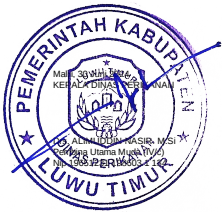
FORMAT 6			FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH																								
DINAS PERIKATAN KABUPATEN LUWU TIMUR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024																											
No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD 2021 sd 2026		Tingkat Capaian Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Pemanggunjawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7*100)		14 = (6+12)		15 = (14/5*100)		16	17
I		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH YANG BERJALAN SESUAI STANDAR (PERSEN)	100	26,035,639,380.00	101.93	4,666,392,473.00	100	4,858,557,700.00	18.18	657,284,959.00	27.22	1,634,994,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40	2,292,279,800.00	45.40%	47.18%	147.33	6,958,672,273.00	147.33%	26.73%		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (Persen)	100	416,500,000.00	100	106,724,970.00	100	107,179,500.00	37.50	6,000,000.00	12.50	22,214,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	28,214,350.00	50.00%	26.32%	150.00	134,939,320.00	150.00%	32.40%		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	165,000,000.00	2	36,313,300.00	2	38,395,500.00	1	4,000,000.00	0	12,253,800.00				1	16,253,800.00	50.00%	42.33%	3.00	52,567,100.00	30.00%	31.86%	Diskan		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	22,000,000.00	2	4,648,000.00	2	4,728,000.00	0	0.00	0	0.00				0	0.00	0.00%	0.00%	2.00	4,648,000.00	40.00%	21.13%	Diskan		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	19,500,000.00	2	5,831,900.00	2	5,918,000.00	1	0.00	0	2,771,000.00				1	2,771,000.00	50.00%	46.82%	3.00	8,602,900.00	60.00%	44.12%	Diskan		
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	50	210,000,000.00	10	59,931,770.00	10	58,138,000.00	4	2,000,000.00	2	7,189,550.00				6	9,189,550.00	60.00%	15.81%	16.00	69,121,320.00	32.00%	32.91%	Diskan		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (Persen)	100	20,448,139,380.00	94.26	2,780,100,524.00	100	3,527,517,450.00	24.59	529,865,386.00	25.41	1,256,697,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,786,563,126.00	50.00%	50.65%	144.26	4,566,663,650.00	144.26%	22.33%		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	31	20,067,411,930.00	26	2,692,088,924.00	26	3,455,463,450.00	26	527,865,386.00	26	1,239,243,740.00				26	1,767,109,126.00	100.00%	51.14%	52.00	4,459,198,050.00	167.74%	22.22%	Diskan		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	90	380,727,450.00	18	88,011,600.00	18	72,054,000.00	4	2,000,000.00	5	17,454,000.00				9	19,454,000.00	50.00%	27.00%	27.00	107,465,600.00	30.00%	28.23%	Diskan		
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar (Persen)	100	110,000,000.00	100	41,925,100.00	100	52,858,000.00	25.00	2,000,000.00	25.00	16,776,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	18,776,800.00	50.00%	35.52%	150.00	60,701,900.00	150.00%	55.18%		
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	20	110,000,000.00	4	41,925,100.00	4	52,858,000.00	1	2,000,000.00	1	16,776,800.00				2	18,776,800.00	50.00%	35.52%	6.00	60,701,900.00	30.00%	55.18%	Diskan		
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (Persen)	100	35,000,000.00	12.68	13,098,950.00	100	14,849,000.00	1.18	0.00	3.97	3,383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	3,383,500.00	5.15%	22.79%	17.83	16,482,450.00	17.83%	47.09%		
		Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	20	35,000,000.00	4	13,098,950.00	4	14,849,000.00	1	0.00	1	3,383,500.00				2	3,383,500.00	50.00%	22.79%	6.00	16,482,450.00	30.00%	47.09%	Diskan		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100	280,000,000.00	142.12	142,665,045.00	100	110,841,850.00	20.00	4,230,500.00	35.00	12,200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	16,431,000.00	55.00%	14.82%	197.12	159,096,045.00	197.12%	56.82%		
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60	130,000,000.00	12	63,186,095.00	12	25,911,850.00	3	2,000,000.00	3	3,482,000.00				6	5,482,000.00	50.00%	21.16%	18.00	68,668,095.00	30.00%	52.82%	Diskan		
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35	150,000,000.00	15	79,478,950.00	8	84,930,000.00	1	2,230,500.00	4	8,718,500.00				5	10,949,000.00	62.50%	12.89%	20.00	90,427,950.00	57.14%	60.29%	Diskan		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (Persen)	100	2,408,500,000.00	100	805,010,193.00	100	567,351,900.00	11.61	71,579,550.00	54.46	223,712,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.07	295,292,290.00	66.07%	52.05%	166.07	1,100,302,483.00	166.07%	45.68%		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan (Paket)	12	35,000,000.00	10	6,855,000.00	12	6,864,000.00	0	0.00	12	3,392,000.00				12	3,392,000.00	100.00%	49.42%	22.00	10,247,000.00	183.33%	29.28%	Diskan		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan (Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan (Paket)	20	15,000,000.00	102	245,719,000.00	4	98,750,000.00	0	0.00	3	67,600,000.00				3	67,600,000.00	75.00%	68.46%	105.00	313,319,000.00	525.00%	2088.79%	Diskan		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan (Paket)	150	20,000,000.00	20	10,680,000.00	20	10,685,500.00	0	0.00	20	4,709,000.00				20	4,709,000.00	100.00%	44.07%	40.00	15,389,000.00	26.67%	76.95%	Diskan		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD 2021 sd 2026		Tingkat Capaian Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (12/7*100)	14 = (6+12)	15 = (14/5*100)	16	17													
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	40,000,000.00	7	9,754,500.00	4	10,070,000.00	0	0.00	3	1,200,000.00			3	1,200,000.00	75.00%	11.92%	10.00	10,954,500.00	50.00%	27.39%	Diskan					
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	240	30,500,000.00	48	5,100,000.00	48	7,500,000.00	7	725,000.00	17	1,175,000.00			24	1,900,000.00	50.00%	25.33%	72.00	7,000,000.00	30.00%	22.95%	Diskan					
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	800	18,000,000.00	332	13,220,000.00	12	13,220,000.00	3	0.00	3	6,494,000.00			6	6,494,000.00	50.00%	49.12%	338.00	19,714,000.00	42.25%	109.52%	Diskan					
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1,000	2,250,000,000.00	230	513,681,693.00	12	420,262,400.00	3	70,854,550.00	3	139,142,740.00			6	209,997,290.00	50.00%	49.97%	236.00	723,678,983.00	23.60%	32.16%	Diskan					
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (Persen)	100	200,000,000.00	0	0.00	100	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,660,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,760.00	0.00%	2.77%	0.00	1,660,760.00	0.00%	0.83%					
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	200,000,000.00	0	0.00	1	60,000,000.00	0	0.00	0	1,660,760.00			0	1,660,760.00	0.00%	2.77%	0.00	1,660,760.00	0.00%	0.83%	Diskan					
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (Persen)	100	1,571,500,000.00	231.63	243,351,430.00	100	271,700,000.00	25.00	40,209,523.00	25.00	61,841,451.00	0.00	0.00	0.00	50.00	102,050,974.00	50.00%	37.56%	281.63	345,402,404.00	281.63%	21.98%					
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10,000	17,500,000.00	4,738	3,464,600.00	12	3,500,000.00	3	0.00	3	1,688,000.00			6	1,688,000.00	50.00%	48.23%	4,744.00	5,152,600.00	47.44%	29.44%	Diskan					
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10	771,000,000.00	10	74,886,830.00	12	84,600,000.00	3	14,709,523.00	3	17,903,451.00			6	32,612,974.00	50.00%	38.55%	16.00	107,499,804.00	160.00%	13.94%	Diskan					
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	783,000,000.00	10	165,000,000.00	12	183,600,000.00	3	25,500,000.00	3	42,250,000.00			6	67,750,000.00	50.00%	36.90%	16.00	232,750,000.00	200.00%	29.73%	Diskan					
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (Persen)	100	566,000,000.00	100	533,516,261.00	100	146,260,000.00	18.75	3,400,000.00	63.64	36,507,000.00	0.00	0.00	0.00	82.39	39,907,000.00	82.39%	27.28%	182.39	573,423,261.00	182.39%	101.31%					
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	371,050,000.00	23	163,714,000.00	23	94,210,000.00	4	2,670,000.00	12	14,982,000.00			12	17,652,000.00	52.17%	18.74%	35.00	181,366,000.00	152.17%	48.88%	Diskan					
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	25	69,950,000.00	40	23,260,000.00	40	23,450,000.00	2	730,000.00	27	7,570,000.00			27	8,300,000.00	67.50%	35.39%	67.00	31,560,000.00	268.00%	45.12%	Diskan					
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3	125,000,000.00	6	346,542,261.00	3	28,600,000.00	0	0.00	3	13,955,000.00			3	13,955,000.00	100.00%	48.79%	9.00	360,497,261.00	300.00%	288.40%	Diskan					
								4,858,557,700.00		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								86.39%	47.18%										
										Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah								
II		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	10,369	10,844,524,900.00	10,373.00	9,049,070,766.69	10,267	9,811,437,800.00	2,677.53	6,000,000.00	2,671.12	3,796,795,708.00			0.00	5,348.65	3,802,795,708.00	52.10%	38.37%	15,721.65	12,851,866,474.69	151.62%	118.51%					
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	100	9,114,385,800.00	100	8,835,623,942.00	100	9,675,542,500.00	30.00	2,000,000.00	13.79	3,762,394,208.00	0.00	0.00	0.00	43.79	3,764,394,208.00	43.79%	38.91%	143.79	12,600,018,150.00	143.79%	138.24%					
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	5	114,385,800.00	4	62,929,130.00	4	75,102,500.00	1	2,000,000.00	1	10,635,500.00			2	12,635,500.00	50.00%	16.82%	6.00	75,564,630.00	120.00%	66.06%	Diskan					
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	10	2,000,000,000.00	1	197,573,377.00	8	1,815,140,000.00	0	0.00	0	0.00			0	0.00	0.00%	0.00%	1.00	197,573,377.00	10.00%	9.88%	Diskan					
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	75	7,000,000,000.00	60	8,575,121,435.00	50	7,785,300,000.00	15	0.00	8	3,751,758,708.00			23	3,751,758,708.00	46.00%	48.19%	83.00	12,326,880,143.00	110.67%	176.10%	Diskan					
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (Persen)	100	730,139,100.00	99.99	154,056,300.00	100	175,895,300.00	9.00	4,000,000.00	6.25	34,401,500.00	0.00	0.00	0.00	15.25	38,401,500.00	15.25%	21.83%	115.24	192,457,800.00	115.24%	26.36%					
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	100	380,526,475.00	40	41,850,900.00	20	42,058,300.00	0	0.00	0	0.00			0	0.00	0.00%	0.00%	40.00	41,850,900.00	40.00%	11.00%	Diskan					
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	60	349,612,625.00	25	112,205,400.00	12	133,837,000.00	3	4,000,000.00	2	34,401,500.00			5	38,401,500.00	41.67%	28.69%	30.00	150,606,900.00	50.00%	43.08%	Diskan					
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar (Persen)	100	1,000,000,000.00	75	59,390,524.69	86	60,000,000.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	87.21%	0.00%	150.00	59,390,524.69	150.00%	5.94%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD 2021 sd 2026		Tingkat Capaian Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7*100)		14 = (6+12)		15 = (14/5*100)		16	17	
		Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	5	1,000,000,000.00	1	59,390,524.69	1	60,000,000.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0.00%	0.00%	1.00	59,390,524.69	20.00%	5.94%	Diskan		
									9,911,437,800.00	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										37.07%	38.37%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
III		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)	316,365	22,240,000,000.00	378,996.70	8,044,541,235.68	378,997	6,417,026,200.00	95,339.80	48,999,500.00	90,429.14	212,595,000.00		0.00			0.00	185,768.94	261,594,500.00	49.02%	4.08%	564,765.64	8,306,135,735.68	178.52%	37.35%		
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (Persen)	100	1,200,000,000.00	99.99	372,385,120.00	100	233,330,200.00	19.05	15,634,500.00	47.62	33,634,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	66.67	49,269,000.00	66.67%	21.12%	166.66	421,654,120.00	166.66%	35.14%		
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	150	700,000,000.00	27	21,787,125.00	12	34,598,200.00	2		0.00	2	5,880,000.00				4	5,880,000.00	33.33%	17.00%	31.00	27,667,125.00	20.67%	3.95%	Diskan		
		Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	150	500,000,000.00	27	350,597,995.00	30	198,732,000.00	6	15,634,500.00	18	27,754,500.00					24	43,389,000.00	80.00%	21.83%	51.00	393,986,995.00	34.00%	78.80%	Diskan		
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	100	21,040,000,000.00	84.07	7,672,156,115.68	100	6,183,696,000.00	0.00	33,365,000.00	0.00	178,960,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	212,325,500.00	0.00%	3.43%	84.07	7,884,481,615.68	84.07%	37.47%		
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20	1,000,000,000.00	4	63,207,000.00	4	74,612,000.00	1	11,005,000.00	1	16,424,500.00					2	27,429,500.00	50.00%	36.76%	6.00	90,636,500.00	30.00%	9.06%	Diskan		
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	50	8,700,000,000.00	8.43	1,263,133,267.28	14	2,830,300,000.00	0		0.00	0	76,835,000.00				0	76,835,000.00	0.00%	2.71%	8.43	1,339,968,267.28	16.86%	15.40%	Diskan		
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	100	10,000,000,000.00	95	5,998,920,628.40	32	2,792,665,000.00	0		0.00	0	0.00				0	0.00	0.00%	0.00%	95.00	5,998,920,628.40	95.00%	59.99%	Diskan		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	150	400,000,000.00	30	73,358,620.00	4	218,463,000.00	1	6,140,000.00	1	15,194,500.00					2	21,334,500.00	50.00%	9.77%	32.00	94,693,120.00	21.33%	23.67%	Diskan		
		Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (Ha)	490,000	940,000,000.00	75,640	273,536,600.00	1,000	267,656,000.00	1,000	16,220,000.00	1,000	70,506,500.00					1,000	86,726,500.00	100.00%	32.40%	76,640.00	360,263,100.00	15.64%	38.33%	Diskan		
									6,417,026,200.00	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										9.11%	4.08%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
IV		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KP TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (PERSEN)	96	250,000,000.00	95	78,243,800.00	96	78,266,500.00	96.00		0.00	96.00	18,449,000.00			0.00	96.00	18,449,000.00	100.00%	23.57%	191.00	96,692,800.00	198.96%	38.68%			
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif (Persen)	100	250,000,000.00	100	78,243,800.00	100	78,266,500.00	100.00		0.00	100.00	18,449,000.00	0.00		0.00	100.00	18,449,000.00	100.00%	23.57%	200.00	96,692,800.00	200.00%	38.68%			
		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	120	250,000,000.00	24	78,243,800.00	4	78,266,500.00	1		0.00	1	18,449,000.00				2	18,449,000.00	50.00%	23.57%	26.00	96,692,800.00	21.67%	38.68%	Diskan		
									78,266,500.00	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	23.57%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang Dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra PD 2021 sd 2026		Tingkat Capaian Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2026 (%)		SKPD Penanggung jawab	Ket															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7*100)		14 = (6+12)		15 = (14/5*100)	16	17														
V		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI HASIL PENGOLAHAN IKAN (TON)	370	6,576,778,050.00	564.46	757,195,553.00	565	1,555,019,500.00	120.87	6,000,000.00	135.04	107,251,400.00		0.00		0.00	255.91	113,251,400.00	45.29%	7.28%	820.37	870,446,953.00	221.72%	13.24%															
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) (Persen)	100	1,860,528,050.00	100	239,460,331.00	100	189,275,000.00	100	2,000,000.00	100.00	54,599,900.00		0.00		0.00	100.00	56,599,900.00	100.00%	29.90%	200.00	296,060,231.00	200.00%	15.91%															
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	20	1,860,528,050.00	4	239,460,331.00	4	189,275,000.00	1	2,000,000.00	1	54,599,900.00					2	56,599,900.00	50.00%	29.90%	6.00	296,060,231.00	30.00%	15.91%	Diskan														
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (Persen)	83	766,250,000.00	85	132,870,490.00	83	125,089,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	18,890,500.00		0.00		0.00	0.00	22,890,500.00	0.00%	18.30%	85.00	155,760,990.00	102.41%	20.33%															
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	25	766,250,000.00	6	132,870,490.00	10	125,089,000.00	0	4,000,000.00	4	18,890,500.00					4	22,890,500.00	40.00%	18.30%	10.00	155,760,990.00	40.00%	20.33%	Diskan														
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (Persen)	100	3,950,000,000.00	75	384,864,732.00	64	1,240,655,500.00	0.00	0.00	0.00	33,761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,761,000.00	0.00%	2.72%	75.00	418,625,732.00	75.00%	10.60%															
		Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	25	3,950,000,000.00	3	384,864,732.00	5	1,240,655,500.00	0	0.00	0	33,761,000.00					0	33,761,000.00	0.00%	2.72%	3.00	418,625,732.00	12.00%	10.60%	Diskan														
									1,555,019,500.00		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						9.30%	7.28%																						
											Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah																						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				65,946,942,330.00					22,820,307,700.00		718,284,459.00		5,770,085,949.00		0.00		0.00		6,488,370,408.00																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				37.86%	28.43%																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :																																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD Tahun Berikutnya :																																								

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	81% ≤ 100%	Sangat Tinggi
(2)	76% ≤ 80%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



Di Evaluasi Oleh:
KEPALA BAPELTIBANGDA

Drs. DOHRI AS'ARI
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip 19670912 198811 1 003

RANCANGAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3		5		6		7
5	BELANJA				22,768,327,700	22,768,327,700	-	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	100	4,858,557,700	4,859,547,700	990,000	
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	107,179,500	107,179,500	-	
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	2	2	38,395,500	38,395,500	-	
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	4,728,000	4,728,000	-	
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	5,918,000	5,918,000	-	
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	58,138,000	58,138,000	-	
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (Persen)	100	100	3,527,517,450	3,528,507,450	990,000	
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	26	26	3,455,463,450	3,456,453,450	990,000	Penambahan Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	18	18	72,054,000	72,054,000	-	
3.25.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar (Persen)	100	100	52,858,000	52,858,000	-	
3.25.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	52,858,000	52,858,000	-	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3		5		6		7
3.25.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (Persen)	100	100	14,849,000	14,849,000	-	
3.25.01.2.04.07	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	4	14,849,000	14,849,000	-	
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Persen)	100	100	110,841,850	110,841,850	-	
3.25.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	12	25,911,850	25,911,850	-	
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	8	8	84,930,000	84,930,000	-	
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (Persen)	100	100	567,351,900	567,351,900	-	
3.25.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6,864,000	6,864,000	-	
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	98,750,000	98,750,000	-	
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	10,685,500	10,685,500	-	
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	10,070,000	10,070,000	-	
3.25.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	48	7,500,000	7,500,000	-	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3		5		6		7
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	13,220,000	13,220,000	-	
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	420,262,400	420,262,400	-	
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (Persen)	100	100	60,000,000	60,000,000	-	
3.25.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	60,000,000	60,000,000	-	
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan (Persen)	100	100	271,700,000	271,700,000	-	
3.25.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	3,500,000	3,500,000	-	
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	84,600,000	84,600,000	-	
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	183,600,000	183,600,000	-	
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (Persen)	100	100	146,260,000	146,260,000	-	
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	23	23	94,210,000	94,210,000	-	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3		5		6		7
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	5	5	23,450,000	23,450,000	-	
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	4	4	28,600,000	28,600,000	-	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	10,216.00	10,216.00	9,911,437,800	9,917,437,800	6,000,000	
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap (Persen)	100	100	9,675,542,500	9,675,542,500	-	
3.25.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan (dokumen)	4	4	75,102,500	75,102,500	-	
3.25.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/Rehap (Unit) KP 1	8	8	1,815,140,000	1,815,140,000	-	
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana Usaha Perikanan ikan yang diberikan Ke Masyarakat (Kelompok) KP 1	50	50	7,785,300,000	7,785,300,000	-	
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan (Persen)	100	100	175,895,300	175,895,300	-	
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan purse saine yang dilatih (orang)	20	20	42,058,300	42,058,300	-	
3.25.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan (kelompok)	12	12	133,837,000	133,837,000	-	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3		5		6		7
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar (Persen)	71	71	60,000,000	66,000,000	6,000,000	
3.25.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab (unit)	1	1	60,000,000	66,000,000	6,000,000	Penambahan Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Kontrak Pemungut Retribusi TPI)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	315,710	315,710	6,417,026,200	6,417,026,200	-	
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan (Persen)	100	100	233,330,200	233,330,200	-	
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya yang diberdayakan (Kelompok)	10	10	34,598,200	34,598,200	-	
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I/ APBD (kelompok)	30	30	198,732,000	198,732,000	-	
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan (Persen)	100	100	6,183,696,000	6,183,696,000	-	
3.25.04.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	74,612,000	74,612,000	-	
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	14	14	2,830,300,000	2,830,300,000	-	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3		5		6		7
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	32	32	2,792,665,000	2,792,665,000	-	
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	4	4	218,463,000	218,463,000	-	
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (Ha)	1,000	1,000	267,656,000	267,656,000	-	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (persen)	94	94	78,266,500	71,336,500	(6,930,000)	
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat pengawas yang aktif (Persen)	100	100	78,266,500	71,336,500	(6,930,000)	
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	78,266,500	71,336,500	(6,930,000)	Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk kegiatan patroli
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil pengolahan ikan (ton)	335	335	1,503,039,500	1,502,979,500		
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) (Persen)	100	100	137,295,000	137,295,000	-	
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	4	4	137,295,000	137,295,000	-	
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya (Persen)	83	83	125,089,000	145,029,000	19,940,000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)		JUMLAH PERUBAHAN (Rp) (+/-)	KET
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3		5		6		7
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	10	10	125,089,000	145,029,000	19,940,000	Penambahan biaya perjalanan dinas
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang (Persen)	64	64	1,240,655,500	1,220,655,500	(20,000,000)	
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	5	5	1,240,655,500	1,220,655,500	(20,000,000)	Pengurangan nilai Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat